



## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Penyelenggaraan dan Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang tarif biaya tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, barang dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1566);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7),

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Lampung Selatan.
6. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dinas dan/atau instansi yang berwenang adalah Dinas Perdagangan dan Pasar dan/atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
8. Keorganisasian kemasyarakatan adalah Lembaga yang terdiri dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur- mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

11. Unit Pelaksanaan Teknis Kemetrolgian Daerah yang selanjutnya disingkat UPTK adalah Lembaga /Instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
12. Penera adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai maupun sudah dipakai.
13. Pengulang tera adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Pengamat Tera adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pekerjaannya melaksanakan pengamatan dan pengawasan UTTP.
15. Reparatur adalah seorang atau sekelompok orang yang mempunyai sertifikat untuk memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi syarat.
16. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakan harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
18. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
19. Pengawasan adalah tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
22. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
23. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
24. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

25. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
26. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
27. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
28. Retribusi pelayanan tera/tera ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**  
**PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN**

Pasal 2

Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Metrologi Legal yang meliputi :

- a. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- b. menera UTTP;
- c. menera ulang UTTP;
- d. pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- e. pengadaan sarana dan prasarana laboratorium;
- f. pengujian UTTP dan BDKT;
- g. pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang;
- h. pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- i. pembinaan dan peningkatan keterampilan reparatir UTTP;
- j. pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera; dan
- k. pengawasan dan penyidikan UTTP dan BDKT.

**BAB III**  
**UTTP YANG WAJIB DITERA, TERA ULANG DAN UTTP**  
**YANG DIBEBAHKAN DARI TERA DAN TERA ULANG**

Pasal 3

- (1) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan dan;
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan dalam perusahaan.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 4

- (1) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera ulang.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh instansi yang membidangi metrologi legal UTTP.

Pasal 5

Penerapan UTTP harus memenuhi syarat-syarat teknis khusus kemetrologian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal dapat dilaksanakan di :

- a. laboratorium Metrologi;
- b. tempat-tempat diluar laboratorium metrologi; dan
- c. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan pemilik UTTP atau pihak ketiga kecuali pada pelaksanaan sidang tera ulang.

- (2) Pelaksanaan tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pemilik UTTP:
- a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
  - b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

#### Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Bupati menentukan tempat dan lokasi sidang tera ulang UTTP Metrologi Legal.

#### Pasal 9

Pegawai yang berwenang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. PNS yang bertugas diunit metrologi legal;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera; dan
- c. diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP**

#### Pasal 10

Masa berlaku dan bentuk tanda tera sah bagi masing-masing UTTP diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

#### Pasal 11

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :
  - a. nama barang dalam bungkusannya itu ;
  - b. ukuran, isi atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
  - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

#### Pasal 12

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang dibuat yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

### Pasal 13

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP**

### Pasal 14

Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP .
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP ;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

### Pasal 15

Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP adalah:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera-ulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera-ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

## **BAB VII KETENTUAN LARANGAN**

### Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu UTTP yang :
  - a. bertanda tera batal;
  - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. tanda teranya rusak;
  - d. setelah adanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berwenang;
  - e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya pada yang diizinkan; dan
  - f. untuk keperluan lain selain dari yang dimaksud.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.



#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

#### Pasal 18

Dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai UTPP untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan kurang dari batas terendah yang ditentukan.

#### Pasal 19

Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan sistem internasional pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada stiker yang dilekatkan atau disertakan pada pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

#### Pasal 20

Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut

### **BAB VIII PENGAWASAN DAN KOORDINASI**

#### Pasal 21

- (1) Pengawas Kemetrolgian berkewajiban melakukan pengawasan terhadap UTPP metrologi legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai.
- (2) Pengawasan terhadap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Pengurus Kemetrolgian dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTPP dan/atau BDKT.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan UTPP dan BDKT.
- (5) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 22

Dengan nama Retribusi pelayanan tera/ tera ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Obyek Retribusi adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenis alat-alat UTTP dan/ BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. alat ukuran panjang;
- b. alat ukur permukaan cairan (level gauge) :
  1. mekanik; dan
  2. elektronik;
- c. takaran (basah/kering);
- d. tangki ukur :
  1. bentuk silinder tegak;
  2. bentuk silinder datar; dan
  3. bentuk bola dan sferoidal;
- e. tangki ukur gerak :
  1. tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon; dan
  2. tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal;
- f. alat ukur dari gelas :
  1. labu ukur, buret dan pipet; dan
  2. gelas ukur;
- g. bejana ukur;
- h. meter taksi;
- i. Speedometer;
- j. meter rem;
- k. tachometer;
- l. thermometer;
- m. densimeter;
- n. viskometer;
- o. alat ukur luas;
- p. alat ukur sudut;
- q. alat ukur cairan minyak :
  1. meter bahan bakar minyak;
  2. meter induk;
  3. meter kerja; dan
1. pompa ukur;
- r. alat ukur gas :

1. meter induk;
  2. meter kerja;
  3. meter gas orifice dan sejenisnya;
  4. perlengkapan meter gas orifice;
  5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG; dan
  6. tabung gas LPG atau gas lainnya;
- s. meter Air :
1. meter induk;dan
  2. meter kerja;
- t. meter cairan minuman selain air :
1. meter induk;dan
  2. meter kerja;
- u. pembatas arus air;
- v. alat kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya;
- w. meter prover;
- x. meter arus massa (meter kerja);
- y. alat ukur pengisi (filling machine);
- z. meter listrik ( meter Kwh ) :
1. meter induk;
  2. meter kerja kelas 2;dan
  3. meter kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5;
- aa. meter energi listrik lainnya;
- bb. pembatas arus listrik;
- cc. stop watch;
- dd. alat ukur kesehatan dan lingkungan hidup;
- ee. anak timbangan :
1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3);
  2. ketelitian halus (kelas F2 dan M1);dan
  3. ketelitian khusus (kelas E2 dan F1);
- ff. timbangan :
1. sampai dengan 3000 kg :
    - a) ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV);
    - b) ketelitian halus (kelas II);dan
    - c) ketelitian khusus (kelas I).
  2. lebih dari 3000 kg :
    - a) ketelitian sedang dan biasa; dan
    - b) ketelitian halus dan khusus.
  3. timbangan ban berjalan.
  4. timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih.
- gg. dead weight tester machine;
- hh. alat ukur takaran darah;
- ii. manometer minyak;
- jj. pressure calibrator;
- kk. pressure recorder;
- ll. pencap kartu (Printer/Recorder) Otomatis;
- mm. meter kadar air :
1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak;
  2. untuk biji-bijian mengandung minyak;dan

3. untuk kayu dan komoditi lain.
- nn. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas;
  2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas; dan
  3. timbangan elektronik untuk semua kapasitas.
- oo. UTTP, yang memerlukan pengujian tertentu;
- pp. UTTP, yang ditanam;
- qq. UTTP, yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;
- rr. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam;
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam;
- tt. Kalibrasi;
- uu. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

#### Pasal 25

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP.

### **BAB X PENGGOLONGAN**

#### Pasal 26

Retribusi pelayanan tera/tera ulang termasuk digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

### **BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB XIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

**BAB XV**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 31

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi dan surat keterangan hasil peneraan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 34

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi serta penyetorannya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tera dan tera ulang UTP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 37

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 39

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 40

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2017

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 28 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**FREDY SM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017**  
**NOMOR**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**  
**PROVINSI LAMPUNG : 11 / 559/LS/2017**



**PENJELASAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/ TERA ULANG**

**I. UMUM**

Bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka perlu menuangkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR**

**I TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG TERA/TERA ULANG**

A. Biaya Restribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi di kantor dan di tempat sidang Tera Ulang

No	Jenis yang dikenakan Retribusi	Satuan	Tera		Tera ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A ALAT UTTP</b>						
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	6,000		4,000	
	b. Lebih dari 2 m sampai 10 m	Unit	12,000		8,000	
	c. Lebih panjang dari 10 m setiap 10 m ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Unit	4,000		2,000	
	d. Ukuran Panjang jenis :					
	1). Salib Ukur	Unit	15,000		10,000	
	2). Blok Ukur	Unit	15,000		10,000	
	3). Mikrometer	Unit	15,000		10,000	
	4). Jangka Sorong	Unit	15,000		10,000	
	5). Alat Ukur Tinggi Orang	Unit	15,000		10,000	
	6). Counter meter	Unit	15,000		10,000	
	7). Roll Tester	Unit	15,000		10,000	
	8). Komparator	Unit	15,000		10,000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	75,000	25,000	50,000	25,000
	b. Elektronik	Unit	125,000	25,000	100,000	25,000
	3. TAKARAN ( BASAH/KERING )					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3,000		2,000	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	6,000		4,000	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	7,000		5,000	
	4. TANGKI UKUR GERAK					
	Tangki Ukur Mobil (TUM)					
	a. Kapasitas sampai 5 kl	Unit	40,000		20,000	
	b. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	1). 5 kl pertama	Unit	40,000		20,000	
	2). Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung kl Tangki Ukur Mobil yang mempunyai daya kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Unit	4,000		2,000	
	5. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Unit	50,000		25,000	
	b. Gelas Ukur	Unit	50,000		25,000	
	6. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	75,000		50,000	
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	150,000		100,000	
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Unit	200,000		150,000	
	d. Lebih dari 500 s/d 1000 L	Unit	225,000		175,000	
	e. Lebih dari 1000 L pada huruf diangka ini ditambah setiap 1000 L	Unit	5,000		5,000	
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L					
	7. METER TAKSI					
		Unit	10,000		5,000	
	8. SPEEDO METER					
		Unit	15,000		7,500	

9.	METER REM	Unit	15,000		7,500	
10.	TACHOMETER	Unit	30,000		15,000	
11.	TERMOMETER	Unit	6,000		3,000	
12.	DENSITYMETER	Unit	6,000		3,000	
13.	VISKOMETER	Unit	6,000		3,000	
14.	ALAT UKUR LUAS	Unit	5,000		2,500	
15.	ALAT UKUR SUDUT	Unit	5,000		2,500	
16.	PEMBATAS ARUS AIR	Unit	9,000	1,000	5,000	
1	2	3	4	5	6	7
17.	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC)/TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	Unit	30,000	10,000	25,000	
18.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	200,000		200,000	
	b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	Unit	400,000		400,000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Unit	600,000		600,000	
	Meter prover yang mempunyai 2 ( dua ) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
19.	METER ARUS MASA					
	Meter kerja					
	a. Sampai dengan 10 Kg/min	Unit	100,000	10,000	100,000	10,000
	b. Lebih dari 10 Kg/min s/d 100 Kg/min	Unit	200,000	10,000	200,000	10,000
	c. Lebih dari 100 Kg/min s/d 500 Kg/min	Unit	300,000	10,000	300,000	10,000
	d. Lebih dari 500 Kg/min s/d 1000 Kg/min	Unit	350,000	10,000	350,000	10,000
	e. Selebihnya dari 1000 Kg/min	Unit	400,000	10,000	400,000	10,000
20.	METER LISTRIK ( METER Kwh )					
	a. Untuk setiap jenis meter induk kelas 0,2 atau kurang					
	1). 3 ( tiga ) Phasa	Unit	80,000	15,000	80,000	15,000
	2). 1 ( satu ) Phasa	Unit	25,000	5,000	25,000	5,000
	b. Meter kerja kelas 1 kelas 0,5					
	1). 3 ( tiga ) Phasa	Unit	10,000	2,000	10,000	2,000
	2). 1 ( satu ) Phasa	Unit	6,000	2,000	6,000	2,000
	c. Meter kerja kelas 2					
	1). 3 ( tiga ) Phasa	Unit	6,000	1,000	6,000	1,000
	2). 1 ( satu ) Phasa	Unit	4,000	1,000	4,000	1,000
21.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Unit	4,000	1,000	4,000	1,000
22.	STOP WATCH	Unit	25,000		25,000	
23.	METER PARKIR	Unit	25,000	3,000	15,000	3,000
24.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa ( Kelas M2 dan M3 )					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Unit	300	100	300	100
	2). Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Unit	600	300	600	200
	3). Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg	Unit	2,000	500	2,000	300
	b. Ketelitian halus ( Kelas F2 dan M1 )					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Unit	1,000	500	1,000	300
	2). Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Unit	2,000	1,000	2,000	500
	3). Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg	Unit	7,500	2,500	5,000	1,000
	c. Ketelitian Khusus ( Kelas E 2 dan F 1 )					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Unit	5,000	2,500	2,500	1,000
	2). Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Unit	10,000	5,000	5,000	2,500
	3). Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg	Unit	15,000	7,500	7,500	5,000
25.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa ( kelas III dan IV )					
	a) Sampai dengan 25 kg	Unit	1,500	500	1,000	500
	b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	2,000	1,000	1,500	1,000
	c) Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	3,000	1,500	1,000	1,500

d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	4,000	2,500	3,000	1,500
e) Lebih dari 1.000 s.d 3.000 kg	Unit	10,000	5,000	7,500	3,000
2). Ketelitian halus ( Kelas II )					
a) Sampai dengan 25 kg	Unit	10,000	5,000	5,000	2,500
b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	12,000	6,000	7,500	3,000
c) Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	14,000	7,000	10,000	5,000
d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	16,000	8,000	12,000	6,000
e) Lebih dari 1.000 s.d 3.000 kg	Unit	20,000	10,000	15,000	7,500
3). Ketelitian halus ( Kelas I )	Unit	36,000	15,000	20,000	10,000
26. DEAD WEIGH TESTING MACHINE					
a. Dead Weigh Testing Machine					
1). Sampai dengan 100 kg/cm	Unit	5,000		5,000	
2). Lebih dari 100 kg/cm s.d 1.000 kg/cm	Unit	20,000		20,000	
3). Lebih dari 1.000 kg/cm	Unit	50,000		25,000	
b. 1). Alat Ukur Darah	Unit	5,000	2,500	2,500	1,000
2). Manometer minyak					
a) Sampai dengan 100 kg/cm	Unit	5,000	2,500	2,500	1,000
b) Lebih dari 100 kg/cm s.d 1.000 kg/cm	Unit	7,500	3,000	5,000	2,500
c) Lebih dari 1.000 kg/cm	Unit	10,000	5,000	7,500	3,000
3). Pressure calibrator	Unit	20,000	10,000	20,000	10,000
4). Pressure recorder					
a) Sampai dengan 100 kg/cm	Unit	5,000	2,500	5,000	2,500
b) Lebih dari 100 kg/cm s.d 1.000 kg/cm	Unit	10,000	5,000	10,000	5,000
c) Lebih dari 1.000 kg/cm	Unit	15,000	7,500	15,000	7,500
27. PENCAP KARTU ( Printer/Recording ) OTOMATIS	Unit	10,000	5,000	2,500	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	28. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25,000	2,500	25,000	2,500
	b. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Unit	25,000	5,000	25,000	3,000
	c. Untuk Kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	25,000	10,000	25,000	5,000
	29. Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai 28 atau benda / barang bukan alat UTTP. Dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam setiap jam kurang dari 1 jam di hitung 1 jam	Unit	5,000		5,000	

B. Biaya Restribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi di tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemohon/Pemilik/Pemakai UTTP

No	Jenis yang dikenakan Retribusi	Satuan	Tera		Tera ulang	
			Pengujian / Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian / Pengesahan/ Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>ALAT UTTP</b>					
	Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	40,000		25,000	
	b. Lebih Dari 2 m sampai 10 m	Unit	75,000		50,000	
	c. Lebih panjang dari 10 m setiap 10 m ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Unit	10,000		7,500	
	d. Ukuran Panjang jenis :					
	1). Salib Ukur	Unit	30,000		20,000	
	2). Blok Ukur	Unit	30,000		20,000	
	3). Mikrometer	Unit	30,000		20,000	
	4). Jangka Sorong	Unit	30,000		20,000	
	5). Alat Ukur Tinggi Orang	Unit	30,000		20,000	
	6). Counter meter	Unit	30,000		20,000	
	7). Roll Tester	Unit	30,000		20,000	
	8). Komparator	Unit	30,000		20,000	
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	100,000	25,000	75,000	25,000
	b. Elektronik	Unit	150,000	25,000	125,000	25,000
	3. TAKARAN ( BASAH/KERING )					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3,000		2,000	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	6,000		4,000	
	c. Lebih dari 25 L	Buah	7,000		5,000	
	4. TANGKI UKUR					
	a. Bentuk slinder tegak					
	1). Sampai dengan 1000 kl	Unit	400,000		400,000	
	2). Lebih dari 1000 kl s/d 2000 kl	Unit	600,000		600,000	
	3). Lebih dari 2000 kl s/d 10.000 kl	Unit	800,000		800,000	
	4). Lebih dari 10.000 kl s/d 20.000 kl	Unit	1,000,000		1,000,000	
	b. Bentuk Bola dan Sferodial					
	1). Sampai dengan 500 kl	Unit	400,000		400,000	
	2). Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl	Unit	600,000		600,000	
	3). Lebih dari 1000 kl	Unit	800,000		800,000	
	c. Bentuk slinder datar					
	1). Sampai dengan 15 kl	Unit	600,000		600,000	
	2). Lebih dari 15 kl s/d 20 kl	Unit	800,000		800,000	
	3). Lebih dari 20 kl s/d 50 kl	Unit	1,000,000		1,000,000	
	4). Lebih dari 50 kl setiap kl bagian bagian dari kl dihitung 1 kl	Unit	20,000		20,000	
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangku Ukur Mobil (TUM)					
	1). Kapasitas sampai 5 kl	Unit	40,000		20,000	

	2). Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a). 5 kl pertama	Unit	40,000		20,000	
	b). Selebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung kl	Unit	4,000		2,000	
	Tangki Ukur Mobil yang mempunyai daya kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	b. Tangki Ukur tongkang tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan Kapal					
	1). Sampai dengan 50 L	Unit	80,000		80,000	
	2). Selebihnya dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a). 50 kl pertama	Unit	80,000		80,000	
	b). selebih dari 50 kl s/d 75 kl , setiap kl	Unit	1,200		1,200	
	c). selebih dari 75 kl s/d 100 kl , setiap kl	Unit	1,000		1,000	
	d). selebih dari 100 kl s/d 250 kl , setiap kl	Unit	700		700	
	e). selebih dari 250 kl s/d 500 kl , setiap kl	Unit	500		500	
1	2	3	4	5	6	7
	f). selebih dari 500 kl s/d 1000 kl , setiap kl	Unit	200		200	
	g). selebih dari 1000 kl s/d 5000 kl, setiap kl bagian bagian dari kl dihitung 1 kl	Unit	100		100	
	6. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Unit	60,000		35,000	
	b. Gelas Ukur	Unit	60,000		35,000	
	7. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	150,000		100,000	
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	200,000		150,000	
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Unit	225,000		175,000	
	d. Lebih dari 500 s/d 1000 L	Unit	275,000		200,000	
	e. Lebih dari 1000 L pada huruf diangka ini ditambah setiap 1000 L bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Unit	10,000		10,000	
	8. METER TAKSI	Unit	10,000		5,000	
	9. SPEEDO METER	Unit	15,000		7,500	
	10. METER REM	Unit	15,000		7,500	
	11. TACHOMETER	Unit	30,000		15,000	
	12. TERMOMETER	Unit	6,000		3,000	
	13. DENSITYMETER	Unit	6,000		3,000	
	14. VISKOMETER	Unit	6,000		3,000	
	15. ALAT UKUR LUAS	Unit	5,000		2,500	
	16. ALAT UKUR SUDUT	Unit	5,000		2,500	
	17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter bahan bakar minyak					
	a. Meter induk					
	Untuk Setiap media uji					
	1). Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> / jam	Unit	80,000	20,000	80,000	20,000
	2). Lebih dari 25 m <sup>3</sup> / jam s/ d 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	200,000	20,000	200,000	20,000
	3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam s/ d 500 m <sup>3</sup> / jam	Unit	300,000	20,000	300,000	20,000
	4). Lebih dari 500 m <sup>3</sup> / jam	Unit	500,000	20,000	500,000	20,000
	b. Meter kerja					
	Untuk Setiap media uji					
	1). Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> / jam	Unit	25,000	5,000	25,000	5,000
	2). Lebih dari 10 m <sup>3</sup> / jam s/ d 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	50,000	5,000	50,000	5,000
	3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam s/ d 500 m <sup>3</sup> / jam	Unit	150,000	5,000	150,000	5,000
	4). Lebih dari 500 m <sup>3</sup> / jam	Unit	300,000	5,000	300,000	5,000
	c. Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Unit	170,000		120,000	
	18. ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1). Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	20,000	10,000	20,000	10,000



2). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam s/ d 500 m <sup>3</sup> / jam	Unit	40,000	10,000	40,000	10,000
3). Lebih dari 500 m <sup>3</sup> / jam s/ d 1000 m <sup>3</sup> / jam	Unit	100,000	10,000	100,000	10,000
4). Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> / jam s/ d 2000 m <sup>3</sup> / jam	Unit	150,000	10,000	150,000	10,000
5). Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> / jam	Unit	250,000	10,000	250,000	10,000
b. Meter Kerja					
1). Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	5,000		5,000	
2). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam s/ d 500 m <sup>3</sup> / jam	Unit	20,000		20,000	
3). Lebih dari 500 m <sup>3</sup> / jam s/ d 1000 m <sup>3</sup> / jam	Unit	30,000		30,000	
4). Lebih dari 1000 m <sup>3</sup> / jam s/ d 2000 m <sup>3</sup> / jam	Unit	40,000		40,000	
5). Lebih dari 2000 m <sup>3</sup> / jam	Unit	50,000		50,000	
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/ unit alat ukur )	Unit	200,000	50,000	100,000	50,000
d. Perlengkapannya meter gas orifice ( jika diuji tersendiri setiap alat perlengkapannya )	Unit	80,000	10,000	40,000	10,000
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji untuk setiap badan ukur	Unit	80,000	10,000	40,000	10,000
19 . METER AIR					
a. Meter induk					
1). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / jam	Unit	80,000	10,000	40,000	10,000
2). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / jam s/d 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	160,000	20,000	80,000	20,000
3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	200,000	25,000	100,000	25,000
b. Meter Kerja					
1). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / jam	Unit	4,000	500	2,000	250
2). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / jam s/d 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	20,000	2,000	10,000	2,000
3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	40,000	5,000	20,000	5,000

1	2	3	4	5	6	7
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / jam	Unit	120,000	15,000	60,000	15,000
	2). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / jam s/d 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	200,000	25,000	100,000	25,000
	3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	240,000	30,000	120,000	30,000
	b. Meter Kerja					
	1). Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> / jam	Unit	6,000	750	3,000	750
	2). Lebih dari 15 m <sup>3</sup> / jam s/d 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	20,000	2,500	10,000	2,500
	3). Lebih dari 100 m <sup>3</sup> / jam	Unit	48,000	6,000	24,000	6,000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Unit	9,000	1,000	5,000	
22.	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	Unit	30,000	10,000	25,000	
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	200,000		200,000	
	b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	Unit	400,000		400,000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Unit	600,000		600,000	
	Meter prover yang mempunyai 2 ( dua ) seksi atau lebih. maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
24.	METER ARUS MASA					
	Meter kerja					
	a. Sampai dengan 10 Kg/ min	Unit	100,000	10,000	100,000	10,000
	b. Lebih dari 10 Kg/min s/d 100 Kg/min	Unit	200,000	10,000	200,000	10,000
	c. Lebih dari 100 Kg/min s/d 1000 Kg/min	Unit	300,000	10,000	300,000	10,000
	d. Lebih dari 500 Kg/min , 1000 Kg/min	Unit	350,000	10,000	350,000	10,000
	e. Selebihnya dari 1000 Kg/min	Unit	400,000	10,000	400,000	10,000
25.	ALAT UKUR PENGISI ( FILLING MACHINE )					
	Untuk setiap jenis media					
	a. Sampai dengan 4 Alat pengisi	Unit	40,000	10,000	40,000	10,000
	b. Selebihnya dari 4 pengisi , setiap alat pengisi	Unit	10,000		10,000	
26.	METER LISTRIK ( METER Kwh )					
	a. Untuk setiap jenis meter induk kelas 0,2 atau kurang					
	1). 3 ( tiga ) Phasa	Unit	80,000	15,000	80,000	15,000
	2). 1 ( satu ) Phasa	Unit	25,000	5,000	25,000	5,000
	b. Meter kerja kelas 1 kelas 0,5					
	1). 3 ( tiga ) Phasa	Unit	10,000	2,000	10,000	2,000
	2). 1 ( satu ) Phasa	Unit	6,000	2,000	6,000	2,000
	c. Meter kerja kelas 2					
	1). 3 ( tiga ) Phasa	Unit	6,000	1,000	6,000	1,000
	2). 1 ( satu ) Phasa	Unit	4,000	1,000	4,000	1,000
27.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Unit	4,000	1,000	4,000	1,000
28.	STOP WACTH	Unit	25,000		25,000	
29.	METER PARKIR	Unit	25,000	3,000	15,000	3,000
30.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa ( Kelas M2 dan M3 )					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Unit	700	100	300	100
	2). Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Unit	1,000	300	600	200
	3). Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg	Unit	6,000	500	2,000	300
	b. Ketelitian halus ( Kelas F2 dan M1 )					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Unit	1,000	500	1,000	300
	2). Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Unit	2,000	1,000	2,000	500
	3). Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg	Unit	7,500	2,500	5,000	1,000
	c. Ketelitian Khusus ( Kelas E 2 dan F 1 )					
	1). Sampai dengan 1 Kg	Unit	5,000	2,500	2,500	1,000
	2). Lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Unit	10,000	5,000	5,000	2,500
	3). Lebih dari 5 Kg s/d 50 Kg	Unit	15,000	7,500	7,500	5,000
31.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa ( kelas III dan IV )					
	a). Sampai dengan 25 kg	Unit	3,000	500	1,000	500
	b). Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	5,000	1,000	1,500	1,000
	c). Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	7,000	1,500	1,000	1,500
	d). Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	10,000	2,500	3,000	1,500

	e). Lebih dari 1.000 s.d 3.000 kg	Unit	17,500	5,000	7,500	3,000
	2). Ketelitian halus ( Kelas II )					
	a). Sampai dengan 25 kg	Unit	12,500	5,000	5,000	2,500
	b). Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	17,500	6,000	7,500	3,000
	c). Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	25,000	7,000	10,000	5,000
	d). Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	32,000	8,000	12,000	6,000
	e). Lebih dari 1.000 s.d 3.000 kg	Unit	42,500	10,000	15,000	7,500
	3). Ketelitian halus ( Kelas I )	Unit	60,000	15,000	20,000	10,000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1). Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Unit	15,000		10,000	
	2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Unit	20,000		15,000	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1). Sampai dengan 100 ton / h	Unit	500,000	25,000	400,000	25,000
	2). Lebih dari 100 ton / h s/d 500 ton/h	Unit	600,000	50,000	500,000	50,000
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	Unit	700,000	100,000	600,000	100,000
1	2	3	4	5	6	7
	d. Timbangan dengan dua skala ( multi range ) atau lebih dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing masing serta menurut tarif pada angka 31.a.b dan c	Unit				
	32. DEAD WEIGH TESTING MACHINE					
	a. Dead Weigh Testing Machine					
	1). Sampai dengan 100 kg/cm	Unit	5,000		5,000	
	2). Lebih dari 100 kg/cm s.d 1.000 kg/cm	Unit	20,000		20,000	
	3). Lebih dari 1.000 kg/cm	Unit	50,000		25,000	
	b. 1). Alat Ukur Darah	Unit	5,000	2,500	2,500	1,000
	2). Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm	Unit	5,000	2,500	2,500	1,000
	b) Lebih dari 100 kg/cm s.d 1.000 kg/cm	Unit	7,500	3,000	5,000	2,500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm	Unit	10,000	5,000	7,500	3,000
	3). Pressure calibrator	Unit	20,000	10,000	20,000	10,000
	4). Pressure recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm	Unit	5,000	2,500	5,000	2,500
	b) Lebih dari 100 kg/cm s.d 1.000 kg/cm	Unit	10,000	5,000	10,000	5,000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm	Unit	15,000	7,500	15,000	7,500
	33. PENCAP KARTU ( Printer / Recording ) OTOMATIS	Unit	10,000	5,000	2,500	1,500
	34. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	47,500	2,500	37,500	2,500
	b. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Unit	47,500	2,500	37,500	2,500
	c. Untuk Kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	45,000	10,000	35,000	5,000
	35. Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai 28 atau benda / barang bukan alat UTTP. Dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam setiap jam kurang dari 1 jam dihitung 1 jam	Unit	5,000		5,000	

No	Jenis yang dikenakan Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>B</b>	<b>BIAYA PENELITIAN</b>			
	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A dengan minimum waktu penelitian 5 jam	jam	20000	
<b>C</b>	<b>BIAYA TAMBAHAN</b>			
	1. Alat UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut, timbangan cepat, timbangan meja dengan kapasitas :			
	1). Sampai dengan 25 kg	Unit	4000	
	2). Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Unit	5000	
	3). Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Unit	6000	
	4). Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	Unit	13000	
	5). Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	Unit	25000	
	6). Lebih dari 3000 kg	Unit	50000	
	b. Timbangan pengisi (curah ) dan Timbangan pencampuran	Unit	25000	

untuk semua kapasitas			
c. Timbangan elektronik untuk :			
1). Kapasitas s/d 1000 kg	Unit	15000	
2). Kapasitas lebih dari 1000 kg	Unit	20000	
d. Neraca Emas tau obat untuk semua kapasitas	Unit	10000	
2. Alat UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Unit	10000	
3. Alat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi atau konstruksi khusus	Unit	10000	
4. Alat UTTP yang di tanam	Unit	10000	
5. Alat UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Unit	1000	
6. Alat UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat Alat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat alat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Unit	1000	
<b>D BIAYA PENGUJIAN KUANTA BDKT</b>			
Pengujian dilakukan perjenis Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) per isi nominal untuk setiap jam dengan minimum pengujian 2 jam	Jam	5000	

<b>E</b>	<b>SERTIFIKASI DAN TABEL</b> Biaya Pengganti sertifikasi / surat keterangan	lembar	25000	
<b>F</b>	<b>KALIBRASI</b> Biaya Kalibrasi	buah	200% Tarif Tera	

## II TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

No	KAPASITAS MESIN / VOLUME KENDARAAN	TARIF ( Rp )	KETERANGAN
1.	11 GT s/d 20 GT	100,000	
2.	12 GT s/d 20 GT	150,000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN